



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 17 April 2017

Halaman: 2

TUNGGAKAN PAJAK DI ATAS RP 1 MILIAR

Pemkot Berhak Lakukan Penyitaan Aset

YOGYA (KR) - Panitia khusus (pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait pendapatan asli daerah tahun 2016 giliran menyoroti wajib pajak hotel yang menunggak pajak. Ketegasan Pemkot akan terus ditagih agar kewajiban tersebut dapat ditunaikan.

Terdapat empat wajib pajak hotel yang berhasil ditemukan BPK RI melakukan penunggakan pajak. Total tunggaknya pun mencapai di atas Rp 1 miliar lantaran menunggak hingga bertahun-tahun. "Dalam LHP BPK RI sudah ada rekomendasi yang harus dijalankan Pemkot. Kami pun meminta supaya Pemkot lebih tegas dalam mengirim surat tagihan," tandas Ketua Pansus LHP BPK RI, Nasrul Khairi, Minggu (16/4).

Guna melakukan klarifikasi atas

tunggakan pajak hotel, pada Kamis (13/4) lalu jajaran pansus turut mengundang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Diketahui, keempat hotel yang menunggak pajak, tiga di antaranya merupakan hotel non-bintang yang menunggak pajak kurun waktu 2011-2014. Nilainya mencapai Rp 599,3 juta. Kemudian satu hotel berbintang memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp 493,8 juta.

Nasrul menambahkan, di samping melayangkan surat tagihan, Pemkot ju-

ga berhak melakukan penyitaan aset. Bahkan jika sampai tidak memiliki itikad baik, dapat diproses hingga penyidikan. "Setelah kami klarifikasi, PHRI DIY siap membantu melakukan pendekatan ke wajib pajak. Pemkot memang harus tegas terhadap semua jenis usaha," tandasnya.

Ketua DPD PHRI DIY, Istijab Danunagoro, menjelaskan pihaknya sudah mengantongi empat hotel yang ditemukan BPK RI telah menunggak pajak tersebut. Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

"Ada ketidakjujuran pemilik hotel sehingga menjadikan pajak menunggak. Tapi harus tetap dibayarkan karena sudah kewajiban," jelasnya.

Bagi hotel nonbintang, persoalan yang dihadapi ialah tingkat okupansi yang rendah. Padahal biaya produksi hotel cukup besar. Selain itu, sistem pembukuan hotel non bintang belum dilakukan secara online sehingga pemasukan yang diterima tidak tertata rapi.

Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Renggono menjamin akan terus melakukan upaya penagihan. Terkait langkah penyitaan, pihaknya terkendala petugas juru sita yang sampai saat ini belum tersedia.

"Temuan ini sudah kami awasi cukup lama. Ada beberapa kendala dalam menagih, salah satunya pergantian pemilik. Tapi upaya penagihan tetap berjalan," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005